

Analisis Keadilan Distributif dalam Alokasi Subsidi Pertanian: Tinjauan Ekonomi Islam

Septiana Ningrum, Subandi Subandi, Finny Ligery*

Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

*Correspondence: ✉ Finnyligery@gmail.com

<https://doi.org/10.51214/biis.v3i2.1848>

ABSTRACT

This study examines the distribution system of subsidized fertilizers in Kotagajah from the perspective of Islamic economic justice. Employing a qualitative field research design, data were collected through observation, in-depth interviews with distributors and farmer groups, and analysis of regulatory and academic sources, and were subsequently analyzed inductively using triangulation techniques. The findings indicate that procedurally the distribution mechanism adheres to the RDKK scheme and the "Six Right" principles; however, its implementation reveals three major pathologies: target displacement that marginalizes smallholder farmers, price distortions through sales above the government's Highest Retail Price (HET), and excessive fertilizer consumption leading to artificial scarcity and ecological degradation. From the standpoint of Islamic economics, these practices represent deviations from the principles of justice (al-'adl), trust (amanah), and the prohibitions of injustice (zulm) and excess (israf). The study concludes that the effectiveness of subsidized fertilizer distribution cannot be assessed solely through procedural compliance but must be grounded in moral integrity, institutional oversight, and a maṣlaḥah-oriented framework to ensure distributive justice and sustainable agricultural development. This study enhances the discourse on Islamic economics by highlighting public subsidy policies that incorporate fiscal instruments, distributive ethics, and ecological preservation. It also introduces a maṣlaḥah-based evaluation framework for policymakers to improve distribution monitoring, aiming to reduce information asymmetry and moral hazard at the grassroots level.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kotagajah dalam perspektif keadilan ekonomi Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan, data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan agen penyalur dan kelompok tani, serta telaah regulasi dan literatur akademik, kemudian dianalisis secara induktif dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural distribusi telah mengikuti mekanisme RDKK dan prinsip "6 Tepat", namun implementasinya masih menghadapi tiga patologi utama: pergeseran target subsidi yang memarginalkan petani kecil, distorsi harga melalui penjualan di atas HET, serta konsumsi pupuk berlebihan yang memicu kelangkaan artifisial dan degradasi ekologis. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut mencerminkan deviasi dari prinsip al-'adl, amanah, larangan zulm, dan israf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas distribusi tidak cukup diukur dari kepatuhan administratif, tetapi harus ditopang oleh integritas moral, pengawasan kelembagaan, dan orientasi maṣlaḥah guna mewujudkan keadilan distributif dan keberlanjutan pertanian. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas diskursus ekonomi Islam mengenai kebijakan subsidi publik yang tidak hanya berfokus pada instrumen fiskal, tetapi juga pada aspek etika distributif dan pelestarian ekologis. Secara praktis, studi ini menawarkan kerangka evaluasi berbasis maṣlaḥah bagi pembuat kebijakan untuk mereformasi sistem pengawasan distribusi guna meminimalisir praktik asimetri informasi dan moral hazard di tingkat akar rumput.

ARTICLE INFO

Article History

Received: 15-02-2024

Revised: 21-11-2024

Accepted: 30-12-2024

Keywords:

Distribution System;
Islamic Economics;
Subsidized Fertilizers;

Histori Artikel

Diterima: 15-02-2024

Direvisi: 21-01-2024

Disetujui: 30-12-2024

Kata Kunci:

Ekonomi Islam;
Pupuk Bersubsidi;
Sistem Distribusi;



A. PENDAHULUAN

Produktivitas pertanian di Indonesia secara struktural masih sangat bergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan pupuk kimia, khususnya urea, sebagai input utama produksi.¹ Di berbagai wilayah pedesaan, termasuk Kecamatan Kotagajah, pupuk bersubsidi menjadi instrumen vital untuk menjaga kesinambungan musim tanam dan menekan biaya produksi petani kecil. Negara telah merumuskan kerangka regulatif yang mengatur alokasi,² harga, dan jalur distribusi pupuk bersubsidi melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)³ serta penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET).⁴ Secara normatif, sistem ini dirancang untuk menjamin prinsip “6 Tepat” (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu).⁵ Namun, realitas lapangan menunjukkan masih terjadinya keterlambatan pasokan,⁶ ketidaktepatan sasaran, penjualan di atas HET, serta ketidaksesuaian antara kuota dan kebutuhan riil petani. Fakta sosial ini menegaskan adanya ketegangan antara desain kebijakan yang ideal dan praktik implementasi di tingkat akar rumput.

Secara literatur, kajian mengenai subsidi pupuk umumnya berfokus pada efisiensi distribusi, ketepatan sasaran (*targeting accuracy*), dan keberlanjutan fiskal.⁷ Pendekatan ekonomi pertanian banyak menggunakan kerangka manajemen rantai pasok, teori *principal-agent*, dan analisis biaya transaksi untuk menjelaskan persoalan koordinasi dan asimetri informasi.⁸ Di sisi lain, literatur ekonomi Islam menempatkan distribusi (*tawzī'*) sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan *al-'adl* (keadilan), *maṣlahah* (kemaslahatan), serta mencegah *ẓulm* (ketidakadilan) dan *isrāf* (berlebih-lebihan).⁹ Meskipun demikian, integrasi

¹ Mega Amelia Putri et al., “Implementation Of Fertilizer Subsidies: Impact On Agriculture And Food Security In Indonesia (A Critical Review),” *Marginal Journal Of Management Accounting General Finance And International Economic Issues* 3, no. 1 (2023): 272–75, <https://doi.org/10.55047/marginal.v3i1.958>.

² Ali Jamil et al., “Subsidized Fertilizer Management in the Rice Production Centers of South Sulawesi, Indonesia: Bridging the Gap between Policy and Practice,” *Open Agriculture* 8, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0233>.

³ Sugiono Sugiono and Siti Faridatul Gufroniah, “Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2022): 374, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465>.

⁴ Fatchur Rozci and Noor Rizkiyah, “Subsidi Pupuk: Kebijakan, Implementasi Dan Peningkatan: Fertilizer Subsidies: Policy, Implementation, and Improvement,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis* 12, no. 1 (2024): 18, <https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v12i1.24>.

⁵ Adjie Manggala Syahriyanda et al., “The Impact of the Effectiveness of Fertilizer Subsidy Policy Implementation on the Technical Efficiency of Corn Farmers in Pamekasan Regency,” *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 9, no. 3 (2025): 632, <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v9i3.25667>.

⁶ Nur Afifah Hermawan et al., “Pengaruh Ketersediaan Dan Harga Pupuk Bersubsidi Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Sengka (Studi Analisis Teori Ibnu Kaldun),” *Advances In Education Journal* 2, no. 2 (2025): 697, <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/263>.

⁷ Dianidza Arodha, “Optimizing Strategy of Subsidized Fertilizer Distribution to POKTAN (Farmer Groups),” *Idarotuna: Journal of Administrative Science* 5, no. 2 (2024): 184–95, <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i2.111>.

⁸ Marhaeni, “The Effectiveness of the Berjaya Farmer Card in Helping the Provision of Fertilizer for Farmers in North Lampung,” *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* 7, no. 1 (2024): 24–42, <https://doi.org/10.23960/ijebe.v7i1.266>.

⁹ Dadang Heru Jatmiko, “Utilization Of Property Distribution In The Conception Of Islamic Economic Justice Through Zakat,” *Al-Hijrah: Journal of Islamic Economics And Banking* 2, no. 2 (2024): 195–215, <https://doi.org/10.55062/al-hijrah.v2i2.660>.

antara analisis empiris tata kelola subsidi dan kerangka normatif ekonomi Islam masih relatif terbatas. Sebagian besar studi cenderung memisahkan evaluasi teknokratis kebijakan dari dimensi etik distribusi, sehingga kurang menangkap bagaimana prinsip-prinsip keadilan diuji dalam praktik distribusi konkret.

Secara konseptual, perdebatan akademik terkait subsidi dan intervensi harga berkisar pada legitimasi peran negara dalam mekanisme pasar. Perspektif neoklasik memandang subsidi dan pengendalian harga sebagai distorsi yang berpotensi mengurangi efisiensi alokasi,¹⁰ sementara pendekatan kesejahteraan dan pembangunan menilainya sebagai instrumen korektif untuk mengatasi ketimpangan struktural.¹¹ Dalam ekonomi Islam, pasar diakui sebagai mekanisme distribusi yang sah, namun kebebasannya tidak bersifat absolut. Intervensi negara (*tas'ir*)¹² dibenarkan apabila terjadi eksploitasi, penimbunan, atau distorsi yang merugikan kepentingan publik.¹³ Dengan demikian, persoalan distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya menyangkut efisiensi logistik, tetapi juga legitimasi moral dan batas etis kebebasan pasar.

Berbagai studi empiris telah mengidentifikasi persoalan klasik dalam distribusi pupuk bersubsidi, seperti *inclusion error*,¹⁴ manipulasi data RDKK,¹⁵ dan penyimpangan harga.¹⁶ Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek administratif dan belum secara sistematis mengaitkannya dengan kerangka keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Di sisi lain, kajian normatif ekonomi Islam lebih banyak menguraikan prinsip ideal distribusi tanpa mengujinya secara mendalam dalam konteks kebijakan subsidi kontemporer. Kesenjangan inilah yang membuka ruang bagi penelitian yang mengintegrasikan analisis tata kelola distribusi dengan evaluasi etik berbasis *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dengan merekonstruksi distribusi pupuk bersubsidi sebagai arena moral-ekonomi yang mempertemukan desain regulatif, diskresi lokal, relasi kuasa, dan perilaku konsumsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian lapangan, studi ini mengidentifikasi tiga patologi distribusi, yaitu pergeseran target subsidi yang memarginalkan petani kecil, distorsi harga yang mencerminkan eksploitasi dalam kondisi kelangkaan, serta konsumsi pupuk berlebihan yang memicu kelangkaan artifisial dan degradasi ekologis. Melalui sintesis antara analisis kebijakan publik dan prinsip keadilan ekonomi Islam, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas distribusi tidak cukup diukur dari kepatuhan prosedural, tetapi harus dinilai dari

¹⁰ Dr Faisal Ahmed, "Economic Analysis of Agricultural Subsidies: Effects on Farmers and Markets," *Frontiers in Agriculture* 1, no. 2 (2024): 447–79, <https://sprcopen.org/index.php/FA/article/view/33>.

¹¹ Iris Delgado et al., "Socioeconomic Inequalities in Chile during the COVID-19 Pandemic: A Regional Analysis of Income Poverty," *PLOS ONE* 20, no. 5 (2025): 1–2, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323409>.

¹² Faidatun Nashihah, "Market Mechanisms in Conventional Economics and Islamic Economics," *Munich Personal RePEc Archive*, no. 93190 (n.d.): 6.

¹³ Sajid Puthenpeedikayil, "Notions of Free Market and Social Welfare in Islamic Economics," *Journal of Modern Accounting and Auditing* 11, no. 9 (2015): 476–86, <https://doi.org/10.17265/1548-6583/2015.09.005>.

¹⁴ Dinda Nor'ainunnajah et al., "Optimizing Transparency and Accountability in Subsidized Fertilizer Budget Distribution and Reporting through Blockchain Technology," *2025 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS)*, December 2025, 1550–55, <https://doi.org/10.1109/ICIMCIS68501.2025.11327152>.

¹⁵ Andi Setyo Pambudi, "Optimalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi: Strategi Pencegahan Maladministrasi Berbasis Analisis SWOT dan PESTEL," *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 15, no. 4 (2025): 746, <https://doi.org/10.52643/jam.v15i4.7393>.

¹⁶ Roby Andreansyah Putra and Mhd Yadi Harahap, "Legal Protection for Farmer Groups in Subsidized Fertilizer Pricing: A Case Study in Kualuh Hilir, North Sumatra," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 10, no. 2 (2025): 335, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.10248>.

kemampuannya merealisasikan keadilan substantif, amanah kelembagaan, dan keberlanjutan pertanian berbasis *maṣlahah*. Dengan demikian tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kotagajah dalam perspektif keadilan ekonomi Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)¹⁷ yang dilaksanakan secara langsung pada konteks empiris distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan orientasi naturalistik, yakni mengkaji fenomena dalam kondisi alamiah tanpa manipulasi variabel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika sistem distribusi secara kontekstual melalui pola pikir induktif yang bertolak dari fakta-fakta lapangan menuju konstruksi konseptual yang lebih umum. Fokus analisis diarahkan pada praktik distribusi pupuk bersubsidi, relasi antar-aktor (agen, kelompok tani, dan pemangku kebijakan), serta kesesuaiannya dengan prinsip distribusi dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret prosedur administratif, tetapi juga mengeksplorasi dimensi tata kelola, akuntabilitas, dan keadilan distributif dalam praktik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*)¹⁸ dengan agen penyalur pupuk bersubsidi, ketua kelompok tani, serta anggota kelompok tani sebagai aktor utama dalam rantai distribusi. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap praktik distribusi secara langsung, termasuk mekanisme penyaluran, ketersediaan stok, dan interaksi antar pelaku distribusi. Dokumentasi institusional, seperti arsip distribusi, profil lembaga, struktur organisasi, serta dokumen kebijakan terkait, digunakan untuk memperkuat validitas temuan lapangan. Data sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan referensi teoritis mengenai sistem distribusi serta ekonomi Islam, sedangkan data tersier berupa ensiklopedia dan sumber rujukan konseptual lain digunakan untuk memperkaya kerangka analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-induktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasi, diseleksi, serta difokuskan pada isu-isu sentral yang relevan dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi dan perspektif ekonomi Islam. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis yang sistematis untuk memetakan pola, hubungan, serta problem struktural dalam distribusi. Selanjutnya, proses verifikasi dilakukan dengan menguji konsistensi temuan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yakni membandingkan data dari berbagai informan dan metode pengumpulan data yang berbeda. Prosedur ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas temuan sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki validitas akademik serta mampu merefleksikan realitas distribusi pupuk bersubsidi secara komprehensif dan bertanggung jawab secara metodologis.

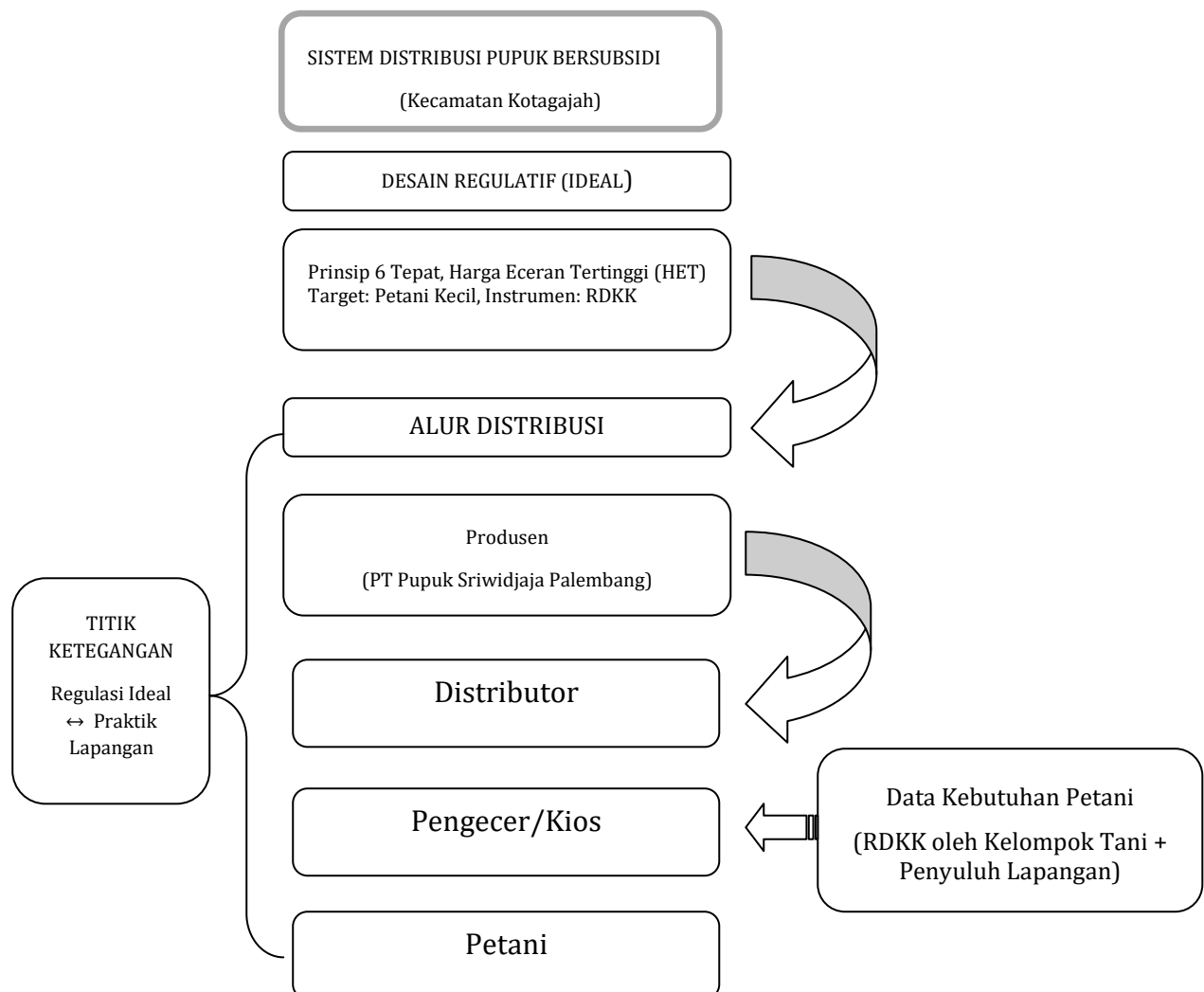
¹⁷ Charles C. Snow and James B. Thomas, "Field Research Methods In Strategic Management: Contributions To Theory Building And Testing*," *Journal of Management Studies* 31, no. 4 (1994): 457–80, <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1994.tb00626.x>.

¹⁸ Walter J. Eppich et al., "In-Depth Interviews," in *Healthcare Simulation Research: A Practical Guide*, ed. Debra Nestel et al. (Springer International Publishing, 2019), 85–91, https://doi.org/10.1007/978-3-030-26837-4_12.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Distribusi Pupuk Bersubsidi: Antara Regulasi dan Realitas Lapangan

Secara Dinamika distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kotagajah memperlihatkan adanya ketegangan inheren antara desain regulatif yang normatif-ideal dan praktik implementatif di tingkat akar rumput. Secara formal, sistem distribusi telah mengikuti pola rantai pasok berjenjang sebagaimana model distribusi konvensional—yang dalam literatur manajemen distribusi kerap diasosiasikan dengan model Glen Watters—yaitu Produsen → Distributor → Pengecer (Kios Resmi) → Konsumen akhir (Petani).¹⁹ Dalam konteks pupuk bersubsidi nasional, produsen seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berperan sebagai entitas hulu yang menyalurkan produk kepada distributor resmi sebelum akhirnya didistribusikan ke kios pengecer dan kelompok tani. Secara administratif, mekanisme akses petani terhadap pupuk bersubsidi ditentukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang disusun secara partisipatif oleh kelompok tani dengan pendampingan penyuluh pertanian lapangan. RDKK berfungsi sebagai instrumen perencanaan kuantitatif sekaligus instrumen kontrol agar alokasi subsidi tepat sasaran.



Gambar 1. *Top-Down Regulatory Governance* pada Distribusi Pupuk Subsidi

¹⁹ Nurman Ali Saiful, "Anomali Pemasaran Jagung di Sulawesi Selatan = Maize marketing anomaly In south sulawesi" (doctoral, Universitas Hasanuddin, 2022), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15367/>.

Secara teoritis, desain ini mencerminkan pendekatan *top-down regulatory governance* yang dipadukan dengan elemen partisipatif di tingkat lokal. Negara menetapkan kerangka normatif dan kuota, sementara kelompok tani diberi ruang untuk mengartikulasikan kebutuhan melalui mekanisme RDKK. Dalam perspektif teori kebijakan publik, model ini dapat dibaca sebagai bentuk *hybrid governance* yang menggabungkan kontrol birokratik dengan partisipasi komunitas.²⁰ Namun demikian, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan desain (*policy design*), melainkan oleh kapasitas implementasi (*implementation capacity*) dan konsistensi koordinasi antarlembaga. Di sinilah muncul gap antara regulasi dan realitas.

Prinsip “6 Tepat”—tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu—secara konseptual merupakan indikator kinerja distribusi yang komprehensif. Dalam perspektif manajemen rantai pasok (*supply chain management*),²¹ keenam prinsip tersebut mencerminkan integrasi antara efisiensi logistik dan akurasi alokasi. Akan tetapi, temuan lapangan menunjukkan bahwa dimensi “tepat waktu” dan “tepat jumlah” menjadi titik lemah implementasi. Keterlambatan pasokan sering terjadi akibat antrean penebusan pada tingkat produsen dan distributor yang bersifat masif dan terpusat, terutama menjelang musim tanam serentak. Kondisi ini menciptakan *bottleneck* dalam sistem distribusi yang berdampak langsung pada kesiapan produksi petani.²²

Secara struktural, fenomena ini dapat dianalisis melalui teori *principal-agent*.²³ Pemerintah sebagai principal menetapkan regulasi dan kuota subsidi, sementara distributor dan pengecer bertindak sebagai agent yang melaksanakan kebijakan di lapangan. Ketika terdapat keterbatasan pasokan atau ketidakseimbangan informasi, agent memiliki ruang diskresi dalam menentukan prioritas distribusi. Diskresi ini, meskipun tidak selalu melanggar regulasi, berpotensi menghasilkan variasi implementasi (*implementation variance*) yang menyebabkan sebagian petani menerima pupuk tidak sesuai kebutuhan temporalnya. Dengan demikian, persoalan distribusi tidak semata persoalan teknis-logistik, tetapi juga persoalan tata kelola dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, disparitas aksesibilitas pupuk menunjukkan adanya problem spasial dalam distribusi. Kios yang berlokasi relatif jauh dari lahan atau pemukiman petani meningkatkan biaya transaksi (*transaction cost*), baik dalam bentuk biaya transportasi maupun waktu. Dalam kerangka ekonomi kelembagaan (*new institutional economics*), peningkatan biaya transaksi akan mengurangi efisiensi kebijakan subsidi karena sebagian manfaat subsidi tereduksi oleh ongkos tambahan yang harus ditanggung petani. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari stabilitas harga (HET), tetapi juga dari rendahnya biaya akses yang menyertainya.

²⁰ Andrews Jack Dotsey, “A Hybrid Governance System for Community Development in Ghana,” *Journal of Nation-Building & Policy Studies* 9, no. 1 (2025): 5–31, <https://doi.org/10.31920/2516-3132/2025/v9n1a1>.

²¹ Hartmut Stadler, “Supply Chain Management: An Overview,” in *Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software, and Case Studies*, ed. Hartmut Stadler et al. (Springer, 2015), 3–28, https://doi.org/10.1007/978-3-642-55309-7_1.

²² Rahmadhana M. Nasir et al., “Manajemen Rantai Pasok Pupuk Subsidi Solusi Untuk Mengatasi Tantangan Kelangkaan Di Sektor Pertanian Padi Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 20, no. 2 (2025): 84, <https://doi.org/10.22437/jpe.v20i2.47336>.

²³ Elang Muhammad Rafly Ramadhan et al., “Corporate Governance and Principal-Agent Theory: A Critical Review,” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 1391–404, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2108>.

Dalam perspektif ekonomi Islam, dinamika ini memiliki implikasi normatif yang signifikan. Subsidi pupuk pada hakikatnya merupakan instrumen redistribusi untuk menjamin keadilan ekonomi (*al-'adl*)²⁴ dan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*).²⁵ Prinsip “tepat waktu” dalam distribusi tidak sekadar aspek teknis, melainkan bagian dari amanah (*trust*) yang harus dipenuhi oleh setiap aktor distribusi. Keterlambatan pasokan yang berdampak pada kerugian produksi petani dapat dikategorikan sebagai bentuk *ḍarar* (kerugian) yang seharusnya dicegah dalam sistem *mu'āmalah* Islami. Dengan demikian, dimensi etis distribusi menjadi sama pentingnya dengan dimensi administratifnya.

Selain itu, ketergantungan pada sistem antrean di tingkat produsen mencerminkan pola sentralisasi distribusi yang kurang adaptif terhadap variasi kebutuhan lokal. Dalam teori desentralisasi fiskal dan administratif, efektivitas distribusi akan meningkat apabila terdapat fleksibilitas pada tingkat lokal untuk menyesuaikan alokasi berdasarkan dinamika musim dan kebutuhan riil. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan sistem *monitoring* yang kuat agar tidak membuka ruang *moral hazard*.²⁶ Di sinilah dilema kebijakan muncul: antara menjaga kontrol pusat dan memberikan otonomi lokal.

Temuan ini menegaskan bahwa dinamika distribusi pupuk bersubsidi bukan sekadar persoalan teknis-logistik, melainkan problem tata kelola *multi-level governance*. Regulasi telah menyediakan kerangka normatif yang relatif komprehensif, tetapi implementasinya menghadapi tantangan koordinasi, kapasitas kelembagaan, dan keterbatasan infrastruktur distribusi. Oleh karena itu, pembenahan sistem memerlukan pendekatan integratif yang mencakup penguatan sistem informasi distribusi, sinkronisasi data RDKK secara real time, serta evaluasi berkala terhadap kinerja distributor dan kios.

Dengan demikian, ketegangan antara regulasi dan realitas lapangan di Kotagajah memperlihatkan bahwa keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi tidak dapat hanya diukur dari kepatuhan prosedural, melainkan dari sejauh mana sistem mampu menjamin keadilan akses, efisiensi waktu, dan kemaslahatan substantif bagi petani sebagai penerima manfaat utama kebijakan.

2. Patologi Distribusi dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam

Analisis terhadap praktik distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kotagajah menunjukkan bahwa problem yang muncul tidak hanya bersifat teknis-administratif, melainkan menyentuh dimensi normatif dan etik dalam kerangka keadilan ekonomi Islam. Secara formal, kebijakan subsidi dirancang sebagai instrumen afirmatif untuk melindungi petani kecil dan menjaga stabilitas produksi pangan. Namun dalam implementasinya, sistem distribusi memperlihatkan gejala patologi, yakni penyimpangan fungsi distribusi dari tujuan kemaslahatan menuju praktik yang berpotensi melanggengkan ketimpangan. Dalam ekonomi Islam, distribusi (*tawzī'*) bukan sekadar pemindahan komoditas, tetapi mekanisme realisasi nilai *al-'adl* (keadilan), *al-kifāyah* (kecukupan), dan *ḍaf' al-ḍarar* (pencegahan kerugian).

²⁴ Sayed Majhab Hasan Amiri, “The Concept of Justice ('Adl) in Islam and Its Relevance in Contemporary Societies,” SSRN Scholarly Paper 5848062 (Social Science Research Network, December 2, 2025), <https://doi.org/10.2139/ssrn.5848062>.

²⁵ Ali Murtadho et al., “Reconstructing Integrative Islamic Economics: Imam Mālik's Substantive Legal-Economic Framework in al-Muwatṭa' and Its Relevance for Contemporary Plural Legal System,” *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 4, no. 1 (2025): 152, <https://doi.org/10.15294/ciils.v4i1.28153>.

²⁶ MV. PAULY, “The Economics of Moral Hazard: Comment,” *Am Econ Rev* 58 (1968): 531–37, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1572261551240948864>.

Ketika distribusi menghasilkan eksklusivitas, eksploitasi, atau pemborosan sumber daya, maka terjadi deviasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bidang ekonomi.

3. Pergeseran Target dan Marginalisasi Hak Petani Kecil

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat petani dengan penguasaan lahan di atas 2 hektar yang turut mengakses pupuk bersubsidi. Secara regulatif, subsidi diperuntukkan bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal dan akses. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran target (*target displacement*) yang mencederai asas keadilan distributif. Dalam teori kebijakan publik, kondisi semacam ini sering dikategorikan sebagai *inclusion error*, yakni kelompok yang seharusnya tidak menjadi penerima justru memperoleh manfaat kebijakan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, subsidi dapat dipahami sebagai instrumen redistribusi yang sejalan dengan semangat zakat dan pengelolaan *baitul māl* untuk memperkecil kesenjangan sosial. Prinsip distribusi dalam Islam berbasis kebutuhan (*need-based allocation*), bukan semata kesetaraan formal.²⁷ Ketika kelompok yang relatif mapan turut mengonsumsi hak kelompok rentan, maka terjadi pelanggaran terhadap *ḥaqq al-milkiyyah* (hak kepemilikan yang sah)²⁸ dan prinsip prioritas distribusi (*awlawayyah*).²⁹ Al-Qur'an melarang pengambilan harta orang lain secara tidak sah (QS. al-Nisā': 29), dan dalam konteks subsidi pupuk, "kebatilan" tersebut dapat berbentuk manipulasi data RDKK, pembiaran sistemik, atau lemahnya verifikasi penerima.

Secara teoritis, ketidakadilan ini mencerminkan kegagalan dalam menerapkan keadilan proporsional (*al-'adl al-tawzī'i*), yaitu pemberian hak sesuai kebutuhan dan kondisi sosial-ekonomi. Jika kebijakan subsidi tidak mampu memprioritaskan petani kecil, maka fungsi afirmatifnya tereduksi dan berpotensi memperlebar ketimpangan agraria.

4. Distorsi Harga dan Eksploitasi Konsumen

Fenomena penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tanpa transparansi harga menunjukkan adanya distorsi mekanisme pasar. Dalam ekonomi konvensional, kenaikan harga akibat kelangkaan sering dipandang sebagai mekanisme penyesuaian alami. Namun dalam ekonomi Islam, pasar bebas tidak bersifat absolut; ia tunduk pada prinsip moral dan kemaslahatan.

Transaksi jual beli memang mensyaratkan adanya kerelaan (*'an tarāḍin*),³⁰ tetapi kerelaan yang lahir dari keterpaksaan struktural—misalnya karena kelangkaan pupuk menjelang musim tanam—tidak mencerminkan kerelaan yang sepenuhnya bebas. Asimetri informasi dan posisi tawar yang timpang menciptakan ketidakadilan relasional. Dalam fikih

²⁷ Douglas D. Hedley and Steven R. Tabor, "Fertilizer in Indonesian Agriculture: The Subsidy Issue," *Agricultural Economics* 3, no. 1 (1989): 49–68, [https://doi.org/10.1016/0169-5150\(89\)90038-8](https://doi.org/10.1016/0169-5150(89)90038-8).

²⁸ Muhammad Wohidul Islam, "Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought," *Arab Law Quarterly* 14, no. 4 (1999): 366, <http://www.jstor.org/stable/3382152>.

²⁹ Mohammad Majduddin and Mukhammad Fanani, "Praktik Transaksi Pupuk Subsidi Dengan Sistem Sepaket Perspektif Fiqih Muamalah," *El-Sahm: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 220, <https://doi.org/10.33754/el-sahm.v4i01.1736>.

³⁰ Maya Surya, "Buying and Selling in Legal, Economic and Social Perspectives," *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal* 1, no. 3 (2024): 267, <https://doi.org/10.70826/ins9mj.v1i3.515>.

mu'āmalah, praktik *ikhtikār* (penimbunan)³¹ dan pengambilan keuntungan berlebihan yang merugikan masyarakat dilarang karena bertentangan dengan prinsip *al-ribḥ al-ma'qūl* (keuntungan yang wajar).

Keuntungan yang diperoleh melalui eksploitasi kebutuhan dasar petani dapat dikategorikan sebagai bentuk *ẓulm* (kezaliman ekonomi). Di sinilah negara memiliki legitimasi moral untuk melakukan intervensi. Pemikiran Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa *tas'īr* (penetapan harga) diperbolehkan apabila pasar menunjukkan distorsi yang merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, pelanggaran HET dalam distribusi pupuk bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran terhadap etika distribusi dalam Islam.

5. Krisis Ekologis akibat Perilaku Konsumsi Berlebihan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian petani menggunakan pupuk kimia—khususnya urea—dalam dosis 300–500 kg/ha, melebihi anjuran teknis 200–300 kg/ha. Secara agronomis, penggunaan berlebih dapat menurunkan kesuburan tanah, meningkatkan ketergantungan input kimia, serta merusak keseimbangan ekologis. Secara ekonomi, konsumsi berlebih oleh sebagian petani menciptakan kelangkaan relatif bagi petani lain, sehingga memicu kelangkaan artifisial.

Dalam etika Islam, perilaku tersebut termasuk *isrāf* (berlebih-lebihan), yang dilarang karena melampaui batas kebutuhan rasional dan mengabaikan prinsip keberlanjutan. Sumber daya dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara proporsional dan bertanggung jawab. Prinsip *wasatiyyah* (moderasi) menuntut keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan.³² Oleh karena itu, konsumsi pupuk yang melampaui dosis anjuran bukan hanya persoalan teknis pertanian, tetapi juga persoalan moral dan ekologis.

Distribusi yang adil tidak hanya ditentukan oleh ketepatan sasaran, tetapi juga oleh perilaku etis penerima dalam memanfaatkan sumber daya. Ketika sebagian petani menggunakan pupuk secara berlebihan, maka mereka secara tidak langsung mengurangi akses petani lain terhadap kuota subsidi yang terbatas.

6. Rekonstruksi Peran Pemerintah: Menuju Distribusi Berbasis Masalah

Dalam kerangka ekonomi Islam, negara berfungsi sebagai *ḥāris al-maṣlaḥah* (penjaga kemaslahatan publik).³³ Islam mengakui mekanisme pasar sebagai sarana distribusi yang efisien, namun tidak membiarkannya berjalan tanpa kendali moral dan regulatif. Intervensi pemerintah melalui penetapan harga (*tas'īr*), pengawasan distribusi, serta pembatasan akses berdasarkan kriteria kebutuhan adalah sah secara syar'i apabila bertujuan mencegah ketidakadilan dan eksploitasi.

³¹ Syaparuddin Syaparuddin, "Measuring The Accomodation of Sharia Principles in Determining the Pricing of Consumer Financing Products of BSM (Sharia Mandiri Bank)," *Al-Ulum* 17, no. 1 (2017): 5, <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.21>.

³² Hesty Widiastuty and Khairil Anwar, "Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya," *Risālah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80, https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.

³³ Hasanudin and Moh Jeweherul Kalamiah, "The Problematic Nature of Marriage Dispensation from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah," *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 64, <https://doi.org/10.64540/alhikmah192>.

Rekonstruksi distribusi pupuk di Kotagajah perlu diarahkan pada integrasi antara efisiensi administratif dan legitimasi moral. Pertama, verifikasi data RDKK harus diperkuat melalui sistem digital dan audit partisipatif untuk mencegah inclusion error. Kedua, pengawasan harga harus dilakukan secara transparan dengan mekanisme pelaporan publik yang mudah diakses. Ketiga, edukasi agronomis dan etika konsumsi perlu diperluas agar penggunaan pupuk sesuai dosis dan tidak menimbulkan dampak ekologis jangka panjang.

Distribusi berbasis masalah berarti memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil secara substantif dan berkelanjutan secara ekologis. Dengan pendekatan ini, subsidi pupuk tidak sekadar menjadi instrumen stabilisasi harga, melainkan sarana transformasi sosial yang memperkuat keadilan agraria, kesejahteraan petani kecil, dan keberlanjutan lingkungan. Tabel 1 merupakan konseptual Patologi Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam beserta alur rekonstruksinya:

Tabel 1. Konseptual Patologi Distribusi Pupuk Bersubsidi dalam Perspektif Keadilan Ekonomi Islam

Tahapan Sistem	Komponen	Uraian
Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi Desain Regulatif (Ideal)	Konsep Umum	Sistem kebijakan pemerintah untuk menyediakan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani guna menjaga produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
	Target	Petani kecil sebagai penerima utama subsidi.
	Instrumen Mekanisme Kontrol	RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Harga Eceran Tertinggi (HET) dan prinsip 6 Tepat (tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu).
	Tujuan	Mewujudkan keadilan distribusi dan kemaslahatan ekonomi bagi petani.
Realitas Implementasi	Pergeseran Target	Terjadi <i>inclusion error</i> di mana petani dengan lahan >2 ha masih menerima subsidi sehingga petani kecil terpinggirkan.
	Distorsi Harga	Penjualan pupuk di atas HET akibat asimetri informasi dan lemahnya pengawasan yang membuka peluang eksploitasi terhadap petani.
	Konsumsi Berlebihan	Penggunaan pupuk melebihi dosis anjuran yang memicu kelangkaan artifisial dan kerusakan ekologis.
Dampak Sistemik	Ketidakadilan	Terjadi ketidakadilan distributif (<i>ẓulm</i>) dalam akses pupuk subsidi.
	Pelanggaran Amanah	Penyimpangan distribusi menunjukkan lemahnya tanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan publik.
	Ketidakseimbangan Ekologis	Praktik konsumsi berlebih mencerminkan perilaku <i>isrāf</i> yang merusak keseimbangan lingkungan.
Rekonstruksi Berbasis Masalah	Reduksi Maqāṣid al-Syarī'ah	Tujuan syariah dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai secara optimal.
	Reformasi Data	Verifikasi data petani dan digitalisasi sistem RDKK.
	Pengawasan Harga	Penguatan kontrol distribusi dan penerapan <i>tas'īr</i> (regulasi harga) yang sah secara syar'i.
	Edukasi Konsumsi	Penyuluhan penggunaan pupuk secara proporsional dan berkelanjutan.

Transparansi Sistem	Penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi distribusi.
Orientasi Kebijakan	Berbasis keadilan, amanah, dan keberlanjutan sesuai prinsip ekonomi Islam.

Tabel 1 menunjukkan adanya jarak antara desain regulatif yang normatif dan praktik implementatif di lapangan. Pada tataran ideal, distribusi pupuk bersubsidi dirancang untuk menjamin keadilan melalui mekanisme administratif seperti RDKK, pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan prinsip “6 Tepat”. Namun dalam praktiknya muncul tiga patologi utama: pergeseran target penerima yang menyebabkan marginalisasi petani kecil, distorsi harga yang menciptakan eksploitasi akibat asimetri kekuatan pasar, serta konsumsi pupuk yang berlebihan yang memicu kelangkaan artifisial dan degradasi lingkungan. Ketiga problem ini menghasilkan dampak sistemik berupa ketidakadilan distributif (*zulm*), pelanggaran amanah, serta penyimpangan dari tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Rekonstruksi sistem diarahkan pada distribusi berbasis maṣlaḥah, yakni integrasi antara efisiensi kebijakan dan legitimasi moral. Pemerintah memiliki legitimasi untuk melakukan *tas'īr* dan pengawasan ketat demi mencegah eksploitasi pasar, disertai penguatan verifikasi data berbasis kebutuhan riil agar subsidi tepat sasaran. Selain itu, edukasi penggunaan pupuk yang proporsional menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah *isrāf*. Dengan pendekatan ini, distribusi pupuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen logistik dan stabilisasi harga, tetapi juga sebagai mekanisme realisasi keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi pertanian.

Kajian ini memberikan kontribusi teoretis dengan merekonstruksi kerangka keadilan distributif dalam ekonomi Islam, menegaskan bahwa distribusi subsidi publik bukan sekadar persoalan alokasi logistik, melainkan manifestasi dari prinsip al-‘adl, amanah, dan integrasi etika lingkungan (*anti-isrāf*) ke dalam kebijakan fiskal sebagai bagian integral dari Maqasid al-Shari’ah. Secara teoretis, hal ini membuktikan bahwa kegagalan distribusi sering kali berakar pada asimetri informasi dan degradasi moral pelaku ekonomi yang melampaui kelemahan regulasi formal. Secara praksis, temuan ini mendesak transformasi pengawasan distribusi dari sekadar kepatuhan administratif menjadi pengawasan berbasis integritas (*social enforcement*) melalui integrasi sistem digital transparan yang mampu memitigasi moral hazard dan distorsi harga. Implikasinya, pembuat kebijakan harus mengarahkan paradigma subsidi menuju pertanian berkelanjutan guna mencegah kerusakan ekologis akibat penggunaan input kimia berlebih, yang dalam perspektif ekonomi Islam merupakan upaya fundamental dalam mewujudkan kemaslahatan jangka panjang (*maṣlaḥah ‘ammah*) bagi petani kecil.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kotagajah secara normatif telah dirancang mengikuti kerangka regulatif yang relatif komprehensif, baik melalui mekanisme RDKK, pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET), maupun prinsip “6 Tepat” sebagai parameter kinerja distribusi. Namun demikian, pada tataran implementatif ditemukan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas lapangan. Kesenjangan tersebut termanifestasi dalam bentuk pergeseran target penerima subsidi (*inclusion error*), distorsi harga akibat lemahnya pengawasan, serta perilaku konsumsi

pupuk yang melampaui dosis anjuran. Problem ini menunjukkan bahwa efektivitas distribusi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan prosedural, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, integritas aktor distribusi, serta konsistensi pengawasan. Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi belum sepenuhnya merealisasikan prinsip al-‘adl (keadilan distributif), amanah, dan maṣlaḥah. Pergeseran sasaran subsidi mencederai prinsip prioritas bagi kelompok rentan; praktik penjualan di atas HET berpotensi mengandung unsur zulm dan eksploitasi; sementara konsumsi berlebihan mencerminkan isrāf yang berdampak pada ketidakseimbangan ekologis dan kelangkaan artifisial. Dengan demikian, problem distribusi bukan hanya persoalan administratif-logistik, melainkan juga persoalan etik dan struktural yang menyangkut legitimasi moral kebijakan publik.

Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi tata kelola distribusi berbasis maṣlaḥah melalui penguatan verifikasi data penerima, digitalisasi sistem distribusi, transparansi harga, serta edukasi agronomis yang berkelanjutan. Intervensi pemerintah dalam bentuk pengawasan dan penetapan harga (*tas‘īr*) memiliki legitimasi syar‘i sepanjang diarahkan untuk mencegah ketidakadilan dan menjamin aksesibilitas petani kecil. Dengan pendekatan integratif antara efisiensi kebijakan dan nilai-nilai normatif Islam, distribusi pupuk bersubsidi berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan agraria, stabilitas produksi pangan, dan keberlanjutan ekonomi pertanian secara lebih substantif.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Faisal. "Economic Analysis of Agricultural Subsidies: Effects on Farmers and Markets." *Frontiers in Agriculture* 1, no. 2 (2024): 444–80. <https://sprcopen.org/index.php/FA/article/view/33>.
- Amiri, Sayed Majhab Hasan. "The Concept of Justice ('Adl) in Islam and Its Relevance in Contemporary Societies." SSRN Scholarly Paper 5848062. Social Science Research Network, December 2, 2025. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5848062>.
- Arodha, Dianidza. "Optimizing Strategy of Subsidized Fertilizer Distribution to POKTAN (Farmer Groups)." *Idarotuna : Journal of Administrative Science* 5, no. 2 (2024): 184–95. <https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i2.111>.
- Delgado, Iris, Sushma Dahal, Maria I. Matute, Paola A. Rubilar Ramírez, Svenn-Erik Mamelund, and Gerardo Chowell. "Socioeconomic Inequalities in Chile during the COVID-19 Pandemic: A Regional Analysis of Income Poverty." *PLOS ONE* 20, no. 5 (2025): e0323409. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0323409>.
- Dotsey, Andrews Jack. "A Hybrid Governance System for Community Development in Ghana." *Journal of Nation-Building & Policy Studies* 9, no. 1 (2025): 5–31. <https://doi.org/10.31920/2516-3132/2025/v9n1a1>.
- Eppich, Walter J., Gerard J. Gormley, and Pim W. Teunissen. "In-Depth Interviews." In *Healthcare Simulation Research: A Practical Guide*, edited by Debra Nestel, Joshua Hui, Kevin Kunkler, Mark W. Scerbo, and Aaron W. Calhoun. Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26837-4_12.
- Hasanudin, and Moh Jeweherul Kalamiah. "The Problematic Nature of Marriage Dispensation from the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī‘ah." *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2025): 55–72. <https://doi.org/10.64540/alhikmah192>.
- Hedley, Douglas D., and Steven R. Tabor. "Fertilizer in Indonesian Agriculture: The Subsidy Issue." *Agricultural Economics* 3, no. 1 (1989): 49–68. [https://doi.org/10.1016/0169-5150\(89\)90038-8](https://doi.org/10.1016/0169-5150(89)90038-8).

- Hermawan, Nur Afifah, Hasanuddin, and Mega Mustika. "Pengaruh Ketersediaan Dan Harga Pupuk Bersubsidi Terhadap Kesejahteraan Petani Di Desa Sengka (Studi Analisis Teori Ibnu Kaldun)." *Advances In Education Journal* 2, no. 2 (2025): 696–701. <https://journal.al-afif.org/index.php/aej/article/view/263>.
- Islam, Muhammad Wohidul. "Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought." *Arab Law Quarterly* 14, no. 4 (1999): 361–68. <http://www.jstor.org/stable/3382152>.
- Jamil, Ali, Muhammad Saleh S. Ali, Imam Mujahidin Fahmid, Darmawan Salman, and Rahmadanih Rahmadanih. "Subsidized Fertilizer Management in the Rice Production Centers of South Sulawesi, Indonesia: Bridging the Gap between Policy and Practice." *Open Agriculture* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0233>.
- Jatmiko, Dadang Heru. "Utilization Of Property Distribution In The Conception Of Islamic Economic Justice Through Zakat." *Al-Hijrah: Journal of Islamic Economics And Banking* 2, no. 2 (2024): 195–215. <https://doi.org/10.55062/al-hijrah.v2i2.660>.
- Majduddin, Mohammad, and Mukhammad Fanani. "PRAKTIK TRANSAKSI PUPUK SUBSIDI DENGAN SISTEM SEPAKET PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH." *El-Sahm: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2025): 211–28. <https://doi.org/10.33754/el-sahm.v4i01.1736>.
- Marhaeni. "The Effectiveness of the Berjaya Farmer Card in Helping the Provision of Fertilizer for Farmers in North Lampung." *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* 7, no. 1 (2024): 24–42. <https://doi.org/10.23960/ijebe.v7i1.266>.
- Murtadho, Ali, Siti Mujibatun, and Maizatul Saadiah Mohamad. "Reconstructing Integrative Islamic Economics: Imam Mālik's Substantive Legal-Economic Framework in al-Muwatṭa' and Its Relevance for Contemporary Plural Legal System." *Contemporary Issues on Interfaith Law and Society* 4, no. 1 (2025): 141–82. <https://doi.org/10.15294/ciils.v4i1.28153>.
- Nashihah, Faidatun. "Market Mechanisms in Conventional Economics and Islamic Economics." *Munich Personal RePEc Archive*, no. 93190 (n.d.): 2019.
- Nasir, Rahmadhana M., Muh Tamrin, Rahman Yakub, and Sofyan B. "Manajemen Rantai Pasok Pupuk Subsidi Solusi Untuk Mengatasi Tantangan Kelangkaan Di Sektor Pertanian Padi Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Paradigma Ekonomika* 20, no. 2 (2025): 82–89. <https://doi.org/10.22437/jpe.v20i2.47336>.
- Nor'ainunnajah, Dinda, Joshua Pratama Silitonga, and Meta Amalya Dewi. "Optimizing Transparency and Accountability in Subsidized Fertilizer Budget Distribution and Reporting through Blockchain Technology." *2025 International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS)*, December 2025, 1550–55. <https://doi.org/10.1109/ICIMCIS68501.2025.11327152>.
- Pambudi, Andi Setyo. "Optimalisasi Tata Kelola Pupuk Bersubsidi: Strategi Pencegahan Maladministrasi Berbasis Analisis SWOT dan PESTEL." *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 15, no. 4 (2025): 743–72. <https://doi.org/10.52643/jam.v15i4.7393>.
- PAULY, MV. "The Economics of Moral Hazard : Comment." *Am Econ Rev* 58 (1968): 531–37. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1572261551240948864>.
- Putra, Roby Andreansyah, and Mhd Yadi Harahap. "Legal Protection for Farmer Groups in Subsidized Fertilizer Pricing: A Case Study in Kualuh Hilir, North Sumatra." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 10, no. 2 (2025): 335–49. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.10248>.
- Putri, Mega Amelia, Werry Darta Taifur, and Nasri Bachtiar. "Implementation Of Fertilizer Subsidies: Impact On Agriculture And Food Security In Indonesia (A Critical Review)." *Marginal Journal Of Management Accounting General Finance And International Economic Issues* 3, no. 1 (2023): 272–86. <https://doi.org/10.55047/marginal.v3i1.958>.
- Ramadhan, Elang Muhammad Rafly, Miryam B. Lilian Wijaya, and Budiana Ruslan. "Corporate Governance and Principal-Agent Theory: A Critical Review." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal*

- Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 2 (2022): 1391–404.
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2108>.
- Rozci, Fatchur, and Noor Rizkiyah. "Subsidi Pupuk: Kebijakan, Implementasi Dan Peningkatan: Fertilizer Subsidies: Policy, Implementation, and Improvement." *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis* 12, no. 1 (2024): 12–21.
<https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v12i1.24>.
- Saiful, Nurman Ali. "Anomali Pemasaran Jagung di Sulawesi Selatan = Maize marketing anomaly In south sulawesi." Doctoral, Universitas Hasanuddin, 2022.
<https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/15367/>.
- Sajid Puthenpeedikayil. "Notions of Free Market and Social Welfare in Islamic Economics." *Journal of Modern Accounting and Auditing* 11, no. 9 (2015): 476–86.
<https://doi.org/10.17265/1548-6583/2015.09.005>.
- Snow, Charles C., and James B. Thomas. "Field Research Methods In Strategic Management: Contributions To Theory Building And Testing*." *Journal of Management Studies* 31, no. 4 (1994): 457–80. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1994.tb00626.x>.
- Stadtler, Hartmut. "Supply Chain Management: An Overview." In *Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models, Software, and Case Studies*, edited by Hartmut Stadtler, Christoph Kilger, and Herbert Meyr. Springer, 2015.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-55309-7_1.
- Sugiono, Sugiono, and Siti Faridatul Gufroniah. "Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Dengan Acuan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Perspektif Etika Bisnis." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 1 (2022): 371–85.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1465>.
- Surya, Maya. "Buying and Selling in Legal, Economic and Social Perspectives." *ISNU Nine-Star Multidisciplinary Journal* 1, no. 3 (2024): 267–75.
<https://doi.org/10.70826/ins9mj.v1i3.515>.
- Syahriyanda, Adjie Manggala, Elys Fauziyah, Dwi Ratna Hidayati, Firman Farid Muhsoni, Meria Zakiyah Alfisuma, and Sitti Aida Adha Taridala. "The Impact of the Effectiveness of Fertilizer Subsidy Policy Implementation on the Technical Efficiency of Corn Farmers in Pamekasan Regency." *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 9, no. 3 (2025): 631–52. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v9i3.25667>.
- Syaparuddin, Syaparuddin. "Measuring The Accomodation of Sharia Principles in Determining the Pricing of Consumer Financing Products of BSM (Sharia Mandiri Bank)." *Al-Ulum* 17, no. 1 (2017): 1–19. <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.21>.
- Widiastuty, Hesty, and Khairil Anwar. "Ekoteologi Islam Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya." *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 465–80.
https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149